



Analisis Tingkat dan Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Batang)

Femmi Febrianti¹, Dr. Muhammad Syafri, S.Pd., M.Si², Abdul Rajab, S.E., M.Si³, Regina, S.E., M.Si⁴, Dr. Sri Astuty, S.E., M.Si⁵

¹²³⁴⁵Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*Email: femmifebrianti661@gmail.com¹, muhammadsyafri@unm.ac.id², abdulrajab@unm.ac.id³, regina@unm.ac.id⁴, sri.astuty@unm.ac.id⁵

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v10i1.3127>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :
026-04-20
Diperbaiki :
2026-05-23
Disetujui :
2026-06-08

Kata Kunci :

Perencanaan,
Pembangunan Desa,
Partisipasi Masyarakat

Keywords : *Planning, Village Development, Community Participation*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam perencanaan pembangunan desa karena warga memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan dan potensi sumber daya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, informan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari aparat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan ibu PKK. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berada pada klasifikasi tinggi dengan rata-rata skor gabungan sebesar 66%. Berdasarkan teori tangga partisipasi Arnstein, tingkat masyarakat berada pada derajat *degree of citizen power* pada tangga keenam yaitu *partnership* (kemitraan). Selain itu, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh adanya faktor pendorong dan faktor penghambat yang saling berinteraksi.

ABSTRACT

Community participation is a crucial element in village development planning because residents have a deep understanding of the problems and potential of local resources. This research aims to analyze the level of community participation in village development planning and identify factors that influence community participation in Batang Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency. This research used a descriptive qualitative approach and this research was determined based on a purposive sampling technique. The informants in this research were 30 people consisting of village officials, hamlet heads, community leaders, religious leaders, youth leaders, and PKK mothers. Data collection techniques are carried out through interviews, questionnaires, observation and documentation. The research results show that the level of community participation in village development planning is in the high classification with an average combined score of 66%. Based on Arnstein's participation ladder theory, the community level is at the level of citizen power on the sixth ladder, namely *partnership*. In addition, it was found that community participation was influenced by the presence of interacting driving and inhibiting factors.

Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 55431

PENDAHULUAN

Secara fundamental, tiap anggota masyarakat mendambakan tercapainya taraf kehidupan yang lebih ideal dan makmur. Konsep ini merujuk pada terpenuhinya kebutuhan dasar yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan individu dan interaksi sosial yang setara, sehingga menghilangkan kekhawatiran akan masa depan. Salah satu isu sosial mendesak, terutama di daerah pedesaan, adalah perlunya reformasi atau perbaikan berkelanjutan dalam proses pembangunan pedesaan (Tambaip et al., 2023). Pembangunan telah menjadi prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Sesuai dengan UUD 1945, tujuan dari pembangunan ini adalah mewujudkan peningkatan kualitas hidup bangsa melalui jalur pendidikan dan turut serta dalam upaya kolektif memelihara stabilitas dan perdamaian internasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, diperlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, di mana partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci yang sangat diharapkan untuk mendukung dan menyukseskan seluruh program pembangunan yang direncanakan (Yuda et al., 2021).

Merujuk pada Pasal 79 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa secara konstitusional berwenang menyusun rencana pembangunan desa. Pelaksanaan kewenangan ini harus disinergikan dengan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan koherensi perencanaan antara tingkat desa dan daerah. Selanjutnya, Pasal 114 PP Nomor 43 Tahun 2014 (yang merupakan regulasi turunan dari UU Desa) mengatur: Perencanaan pembangunan desa wajib didasarkan pada keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut harus diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun anggaran terkait. Frederikus Naisoko (2024) menekankan bahwa produk perencanaan desa menjadi landasan utama bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan dokumen strategis. Hal ini mencakup perencanaan jangka menengah melalui RPJMDes, agenda kerja tahunan melalui RKPDes, serta kompilasi usulan RKPDes sebagai bentuk tindak lanjut perencanaan pembangunan.

Dalam pandangan Tambaip et al., (2023), pembangunan pedesaan perlu diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, yang akan berfungsi sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi regional secara efektif dan stabil. Tujuan substansial dari pembangunan desa adalah untuk menguatkan kapasitas serta motivasi masyarakat agar berpartisipasi secara optimal dalam setiap rangkaian kegiatan pembangunan. Indikator fundamental keberhasilan pembangunan desa tercermin melalui keterlibatan yang aktif, nyata, dan berkelanjutan dari masyarakat di seluruh tahapan proses pembangunan. Hal ini menuntut perencanaan pembangunan dilakukan secara teliti dan presisi, mengingat tujuannya adalah penguatan kapabilitas masyarakat dalam perspektif jangka panjang.

Secara fundamental, esensi pembangunan diarahkan sebagai instrumen untuk mengakselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Definisi ini didukung oleh Beratha (1982), yang menganggap pembangunan nasional sebagai usaha makro bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Keberhasilan (efektivitas) pembangunan menuntut partisipasi yang esensial dan konkret dari semua stakeholder dalam perumusan rencana yang berdampak pada mereka. Jika kontribusi masyarakat dihargai, maka akan terjadi peningkatan pada kualitas, efektivitas, dan efisiensi pembangunan secara keseluruhan.

Peran aktif masyarakat dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur desa saat ini sudah sangat signifikan. Kontribusi mereka dapat berupa sumbangan fisik dan non-fisik,

seperti: tenaga, ide/gagasan, dana, penyediaan lahan, dan bahan material. Peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan merupakan faktor pendorong utama yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan proses dan optimalisasi output dari program-program yang dijalankan (Rahayuningsih & Arbayah, 2021).

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada perencanaan yang matang di awal, yang memungkinkan semua pihak terlibat dapat bekerja dalam memenuhi kebutuhan publik. Sehubungan dengan itu, pada fase perencanaan, musyawarah adalah kegiatan krusial di mana masyarakat dapat menentukan program dan kebijakan pembangunan daerah. Melalui partisipasi dalam musyawarah, masyarakat turut serta secara langsung dalam merumuskan program pembangunan yang secara kolektif akan mewujudkan kepentingan bersama (Naisoko & Bait, 2024). Di daerah pedesaan, fokus pembangunan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Strategi pembangunan berbasis pemberdayaan dan ekonomi ini dinilai paling efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Yuda et al., 2021).

Pada kerangka perencanaan pembangunan desa, partisipasi aktif masyarakat memiliki peran yang krusial dalam perumusan kegiatan. Alasan utamanya adalah masyarakat lokal merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya, termasuk permasalahan nyata serta potensi sumber daya yang dimiliki. Keterlibatan mereka sangat memudahkan dan menjamin kelancaran baik proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa (Naisoko & Bait, 2024).

Musrenbang Desa merupakan wadah representatif bagi masyarakat, di mana keterlibatan riil di dalamnya menjadi basis utama dalam menjamin keberhasilan dan keberlangsungan program pembangunan desa. Hal ini merefleksikan sebuah kemitraan komprehensif yang menyatukan beragam entitas, yaitu pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk bertanggung jawab bersama dalam mengelola pembangunan desa. Pengelolaan ini mencakup pemanfaatan sarana dan sumber daya di berbagai bidang, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Abduh Aqil Yuda, 2021). Implementasi perencanaan partisipatif mampu memperluas wawasan masyarakat dan pelaksana pembangunan desa dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada. Kondisi ini secara bertahap akan menguatkan kapabilitas mereka dalam memformulasikan dan memprogramkan pembangunan yang kontekstual dengan desa, yang prosesnya kemudian dicatat secara resmi melalui Musrenbang Desa (Darin et al., 2022).

Dalam proses perencanaan, musrenbang merupakan wadah strategis yang mengakomodasi penyampaian aspirasi dan identifikasi kebutuhan oleh masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan Musrenbang dilakukan secara bertingkat, mencakup seluruh level administrasi pemerintahan, dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga puncaknya di tingkat nasional. Musrenbang Kelurahan/Desa adalah forum tahunan di tingkat dasar yang berfungsi untuk mengumpulkan usulan masyarakat guna menentukan prioritas pembangunan, yang kemudian menjadi input utama sebagai bagian dari proses perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan diterapkan pada tahun selanjutnya. Kunci keberhasilan agenda tersebut adalah partisipasi aktif dari masyarakat local (Azhar, 2015).

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus bersifat berorientasi ke bawah (*bottom-up*) dan melibatkan masyarakat luas, dengan memberikan otoritas perencanaan dan pelaksanaan kepada pemerintah daerah. Musrenbang desa berfungsi sebagai platform vital untuk menampung aspirasi publik selama penyusunan dan perumusan dokumen rencana pembangunan desa, khususnya dalam hal proses perencanaan pembangunan tidak lagi mengadopsi pendekatan sentralistik (*top-down*), melainkan diarahkan untuk mentransformasikan pembangunan sebagai

sebuah kultur yang mengedepankan inisiatif berbasis akar rumput (*bottom-up*). Mengingat pembangunan merupakan kepentingan publik dan bukan sekadar instrumen bagi segelintir kelompok, maka partisipasi masyarakat yang inklusif menjadi krusial untuk memastikan bahwa cakupan program mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata (Hadawiya et al., 2021).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sebagian besar penelitian masih berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat secara umum dan belum secara spesifik mengkaji tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif partisipasi masyarakat tanpa mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hadawiya (2021) dan Ismail (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta belum optimalnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum mengukur tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tahapan pembangunan desa secara komprehensif serta belum mengkaji bagaimana faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan karakteristik individu memengaruhi partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memberikan gambaran empiris mengenai tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan desa secara partisipatif, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan

Pembangunan di tingkat desa diorientasikan dengan menitikberatkan pada upaya sistematis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat guna mewujudkan kondisi kesejahteraan yang lebih inklusif dan merata, dan ini saling terkait dengan kepentingan daerah (kabupaten dan provinsi), terutama menyangkut isu sosial, ekonomi, pasar, dan politik di desa. Menurut Rosana (2012), pembangunan dapat diartikan sebagai ikhtiar peningkatan kualitas menuju kondisi yang lebih optimal, sesuai dengan standar baku tertentu. Pembangunan adalah faktor vital bagi jaminan kelangsungan hidup entitas bangsa dan negara di masa depan, dan keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas proses perencanaan (Setiawan, 2023).

Inti pembangunan adalah proses perubahan berkelanjutan yang membawa kemajuan dan perbaikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengutip Siagian (1994), pembangunan dapat didefinisikan sebagai ikhtiar yang terstruktur dan terprogram yang diinisiasi oleh negara,

pemerintah, dan seluruh elemen bangsa untuk mencapai akselerasi pertumbuhan, perubahan struktural, dan modernitas dalam rangka penguatan karakter bangsa (Wahyudin, 2018).

Sementara itu, Sahroni (2004) mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang sistematis yang setidaknya mencakup tiga komponen: Masukan (Input) sebagai bahan awal, proses konversi sebagai wahana yang mentransformasi masukan, dan Keluaran (Output) sebagai hasil dari proses transformasi tersebut. Proses sistematis ini juga saling berhubungan dengan subsistem dan sistem lain, termasuk lingkungan internasional (Ariadi, 2019). Hanif (2011) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan manifestasi dari upaya transformasi terprogram oleh representasi negara yang diorientasikan pada pencapaian tujuan pembinaan nilai-nilai kebangsaan secara komprehensif dan terukur. Dalam proses ini, peran aktif seluruh masyarakat sebagai pelaksana pembangunan dan peran pemerintah sebagai pembimbing dan pengarah sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai (Latif & Mustamin, 2019).

Sondang membagi makna pembangunan menjadi dua aspek: a. Upaya kolektif masyarakat untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan mereka sebagai bangsa, demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b. Serangkaian usaha terencana dan sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan, perubahan, dan modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan Desa

Karakteristik desa sebagai entitas otonom ditegaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, yang mengakui desa (termasuk desa adat) sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan untuk mengelola urusan internalnya. Otonomi ini memberikan ruang bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan mandiri, termasuk wewenang legislasi melalui Peraturan Desa yang disahkan atas persetujuan BPD. Dalam konteks pembangunan, otonomi tersebut menjadi fondasi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan memupuk budaya swadaya, guna menciptakan kemandirian masyarakat desa yang berkelanjutan (Bramantyo et al., 2022).

Menurut Ndraha (1990), pembangunan desa didefinisikan sebagai sebuah proses di mana penduduk desa memiliki potensi besar sebagai Sumber daya manusia berfungsi ganda, yaitu: sebagai objek pembangunan yang menuntut peningkatan kualitas dan pemberdayaan; dan sebagai subjek (penggerak utama) yang memegang peranan vital dalam memformulasikan arah pembangunan desa dan nasional (Bramantyo et al., 2022). Tujuan strategis pembangunan desa diorientasikan pada eskalasi kualitas hidup dan kesejahteraan kolektif masyarakat. Pencapaian target tersebut memiliki interdependensi yang kuat dengan konstelasi kepentingan pada level kabupaten maupun provinsi, mengingat pembangunan desa beririsan langsung dengan dimensi fundamental yang mencakup aspek sosial-ekonomi serta dinamika pasar dan politik.

Desa memegang peran ganda sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi sebagian besar populasi nasional sekaligus wilayah yang rentan terhadap permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, optimalisasi otonomi desa dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya krusial bagi pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung resiliensi sistem pertahanan nasional. Kontribusi desa dalam pembangunan nasional sangatlah signifikan, mengingat desa tidak hanya menjadi kediaman mayoritas populasi Indonesia, tetapi juga menyediakan dukungan substansial terhadap stabilitas nasional. Pembangunan desa ialah elemen yang sangat penting dalam keseluruhan kerangka pembangunan (Bramantyo et al., 2022).

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses sistematis dan rasional untuk menyusun rencana pembangunan di suatu wilayah. Rencana ini mencakup arah dan langkah-langkah penggunaan sumber daya agar sehingga visi dan misi masa depan bangsa dapat terealisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Rencana tersebut berfungsi sebagai panduan atau rencana tindakan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan harus dirumuskan agar bersifat pragmatis yaitu mampu diimplementasikan dan relevan untuk diaplikasikan di lapangan (Rahayuningsih & Arbayah, 2021).

Pembangunan partisipatif harus dimulai sejak tahap perencanaan. Urgensi perencanaan didasarkan pada keterbatasan sumber daya, terutama aspek finansial, yang menuntut adanya pertimbangan prioritas dalam menyeleksi program atau kegiatan. Merujuk pada akar katanya, perencanaan didefinisikan sebagai turunan dari kata 'rencana', yang merepresentasikan sebuah rancangan konseptual atau kerangka kerja yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Makna perencanaan bervariasi karena tergantung pada pandangan para ahli dan belum ada definisi tunggal yang diterima. Perencanaan pembangunan secara umum harus mencakup, diketahui, dan mempertimbangkan beberapa unsur pokok berikut:

- a. Tujuan akhir yang ingin dicapai.
- b. Target (sasaran) dan prioritas yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.
- c. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
- d. Modal atau sumber daya yang tersedia dan cara alokasinya.
- e. Kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan untuk pelaksanaan.
- f. Pelaksana (orang, organisasi, atau badan) yang bertanggung jawab.
- g. Mekanisme untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan juga harus dipertimbangkan (Yuda et al., 2021).

Empat tahapan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Pembangunan Desa

Tahap ini bertujuan guna memfinalisasi dokumen perencanaan yang komprehensif dan telah memenuhi syarat untuk disahkan. Tahapannya adalah menyusun draf rencana pembangunan yang memiliki karakteristik teknokratis, menyeluruh (komprehensif), dan akuntabel (terukur). Implementasi perencanaan ini mencakup tahap penyusunan rancangan oleh setiap instansi, pelibatan pemangku kepentingan, serta sinkronisasi program di seluruh jenjang pemerintahan melalui kegiatan Musrenbang. Rangkaian ini ditutup dengan pengesahan dokumen perencanaan secara formal.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Proses pelaksanaan pembangunan desa mencakup tahap tindak lanjut yang dilakukan setelah proses perencanaan pembangunan selesai. Pelaksanaan pembangunan desa adalah proses mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi kegiatan nyata di lapangan. Tahap ini berfokus pada implementasi program pembangunan yang telah disepakati dan diformalkan dalam forum Musrenbang, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam RPJMDes serta RKPDes.

c. Evaluasi/Monitoring (Pengawasan Proses Pembangunan)

Pengawasan merupakan tahapan krusial dengan tujuan menilai efektivitas jalannya program atau kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana awal, aturan, dan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memonitoring sangat diperlukan pada tahap ini. Peninjauan pelaksanaan rencana berfungsi sebagai elemen esensial dalam tata kelola

© Femmi Febrianti¹, Dr. Muhammad Syafri, S.Pd., M.Si², Abdul Rajab, S.E., M.Si³, Regina, S.E., M.Si⁴, Dr. Sri Astuty, S.E., M.Si⁵

perencanaan yang terstruktur. Melalui mekanisme pengumpulan dan analisis informasi, proses ini memungkinkan pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan serta efektivitas kinerja pembangunan secara objektif. Evaluasi ini harus dilakukan dengan mengacu pada indikator dan target kinerja yang sudah tertera secara resmi dalam dokumen perencanaan pembangunan (Rahayuningsih & Arbayah, 2021).

d. Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa

Pemanfaatan adalah proses menggunakan, menikmati, dan mengambil keuntungan dari semua sarana, prasarana, dan program yang dihasilkan melalui kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, fokusnya bukan hanya pada proses membangun itu sendiri, tetapi bagaimana hasil pembangunan tersebut digunakan dan memberikan manfaat. Pada akhirnya, hasil pembangunan harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk tujuan peningkatan kualitas hidup mereka.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Menurut Sumaryadi (1996), partisipasi secara etimologis berakar dari kata participation, yang merepresentasikan aktivitas kolektif untuk menstimulasi keterikatan emosional serta keterlibatan aktif anggota dalam aktivitas operasional suatu organisasi. Secara substantif, partisipasi dapat diartikan sebagai manifestasi keterlibatan individu maupun kolektif masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan. Peran ini dapat diwujudkan melalui artikulasi lisan maupun aksi nyata yang menyumbangkan ide/pemikiran, sumber daya non-fisik (tenaga, waktu, keahlian), sumber daya finansial (modal/materi), dan juga hak untuk mengendalikan serta menikmati manfaat dari pembangunan yang dihasilkan (Pono et al., 2022).

Ciri-ciri partisipasi masyarakat bersifat proaktif, bahkan reaktif. Ini berarti masyarakat seharusnya aktif berpikir dan bertindak sebelum adanya suatu kesepakatan, dalam konteks pembagian wewenang dan tanggung jawab. Keterlibatan masyarakat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi. Oleh karena itu, rencana atau program yang disusun wajib mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat dan memiliki sasaran utama peningkatan kesejahteraan hidup mereka (Poespitohadi & Fe, 2023).

Dalam penelitian ini, teori partisipasi masyarakat yang digunakan adalah teori tangga partisipasi (A Ladder of Citizen Participation) yang dikemukakan oleh Arnstein (1969). Teori ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi delapan tingkatan yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu non participation, tokenism, dan citizen power. Pada kategori non participation, masyarakat belum memiliki kekuatan dalam menunjukkan kebijakan pembangunan karena hanya dijadikan objek pembangunan. Pada kategori tokenism, masyarakat mulai diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, namun belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengambil keputusan. Sedangkan pada kategori citizen power, masyarakat memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pembangunan (Arnstein, 1969).

Adapun delapan tingkatan skema partisipasi tersebut dapat dipelajari melalui tabel yang terangkum dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

No.	Tangga	Derajat
1.	Pengkondisian Opini	Tidak ada partisipasi
2.	Intervensi Perilaku	
3.	Diseminasi Informasi	
4.	Penyerapan Aspirasi	Tingkat tokenisme
5.	Peredam Kemarahan	
6.	Kolaborasi Sinergis	
7.	Devosi Otoritas	Tingkat kekuasaan warga negara
8.	Otonomi Penuh	

Sumber : " A Ladder of Citizen Participation ", by S. R. Arnstein, (1969), Jurnal of the American Institute of Planner. "

Berdasarkan konsep Sherry R. Arnstein (1969), terdapat delapan tingkatan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah. Penentuan tingkatan ini didasarkan pada spektrum kekuasaan yang dimiliki masyarakat, yang tersusun dari derajat partisipasi tertinggi menuju terendah, yakni:

a. Manipulation

Manipulasi Ini adalah tingkat partisipasi paling rendah. Pada tingkat ini, masyarakat hanya digunakan namanya saja (pura-pura partisipasi) guna memperoleh legitimasi publik dan mengemukakan komitmen perbaikan, meskipun komitmen tersebut tidak pernah terimplementasi.

b. Theraphy

Pada tingkat ini, pemberi otoritas menyerahkan pembenaran atas usulan yang diajukan dengan dalih melibatkan masyarakat.

c. Informing

Informing (Memberi Informasi) Otoritas dalam hal ini pemegang kekuasaan mendistribusikan informasi mengenai aktivitas tertentu kepada komunitas masyarakat. Masyarakat mendapatkan data dalam bentuk hak, kewajiban, dan opsi keputusan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi atau memberikan umpan balik yang dapat memengaruhi hasil keputusan.

d. Consultation

Informing (Memberi Informasi) Otoritas terkait mendistribusikan informasi mengenai suatu aktivitas kepada komunitas masyarakat. Masyarakat diberikan data mengenai hak, kewajiban, dan opsi, namun tidak memiliki otoritas untuk negosiasi atau menyalurkan umpan balik yang dapat memengaruhi hasil keputusan. Dengan demikian, keberdayaan masyarakat belum tercipta.

e. Placation

Pada tahap ini, pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah mulai menetapkan beberapa perwakilan masyarakat yang strategis untuk mengisi posisi di badan publik.

f. Partnership

Masyarakat memiliki hak untuk bernegosiasi terkait pengambilan kebijakan dengan pihak pemerintah. Kekuasaan mulai dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah

g. Delegated Power

Pada jenjang ketujuh ini, masyarakat diizinkan memformulasikan keputusan pada fase perencanaan tertentu, yang vital bagi penyelesaian masalah. Pemerintah diwajibkan melakukan negosiasi dengan masyarakat tanpa adanya paksaan dari otoritas yang lebih tinggi.

h. Citizen Contro

Tingkatan paling tinggi, dimana masyarakat dapat turut Ini adalah tingkat partisipasi tertinggi, yang menjadi wadah bagi partisipasi dan kendali masyarakat atas keseluruhan proses penetapan keputusan. Pada jenjang ini, masyarakat memiliki kapabilitas untuk mengelola program atau kelembagaan yang terkait dengan kepentingan mereka.

Musrenbang Desa

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Musrenbang Desa berfungsi sebagai wahana konsultasi bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk merumuskan prioritas agenda pembangunan. Output dari forum ini berupa penetapan program yang bersifat urgen bagi desa, dengan dukungan kerangka pendanaan yang berasal dari APBDes, inisiatif swadaya masyarakat, hingga integrasi anggaran pada tingkat kabupaten/kota (Rahayuningsih & Arbayah, 2021).

Menurut W. Sumasran (2016), Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2004 berfungsi sebagai wadah untuk menyelaraskan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Mekanisme ini memfasilitasi sinkronisasi rencana pembangunan secara sistematis melalui alur administratif yang berkesinambungan, mulai dari skala desa menuju kecamatan hingga tingkat kabupaten (Rufita et al., 2019).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) memiliki dua fungsi utama:

- a. Sebagai alat untuk mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan desa antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.
- b. Sebagai instrumen untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana, melibatkan individu penting seperti tokoh masyarakat, cendekiawan, ulama, dan tokoh adat. Selain itu, Musrenbang desa bertujuan menciptakan sistem perencanaan partisipatif, yang merefleksikan penerapan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan (Ismail et al., 2023).

Musrenbang desa berfungsi sebagai wahana dialog, diskusi, dan komunikasi pembangunan guna menetapkan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Namun, dalam praktiknya, Musrenbang sering kali dianggap hanya sebagai rutinitas seremonial belaka dan diwarnai berbagai masalah, seperti rendahnya perhatian serius terhadap keterlibatan masyarakat di dalamnya. Selain itu, program pembangunan yang diajukan dalam musrenbang desa sering kali tidak selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, dalam pelaksanaannya, program-program pembangunan tersebut belum tentu memberikan manfaat signifikan atau dampak positif bagi masyarakat (Ismail et al., 2023).

Musrenbang berperan sebagai wahana integratif yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara pemerintah dan elemen masyarakat. Kapabilitas forum ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi potensi lokal, menengahi konflik kepentingan melalui proses rekonsiliasi, dan mencapai konsensus yang definitif mengenai orientasi kegiatan serta distribusi sumber daya pembangunan desa (Rahayuningsih & Arbayah, 2021).

Adapun tujuan musrenbang desa antara lain mengartikulasikan kebutuhan, permasalahan, dan prioritas desa yang akan diintegrasikan sebagai input dalam formulasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), melalui proses pemilahan:

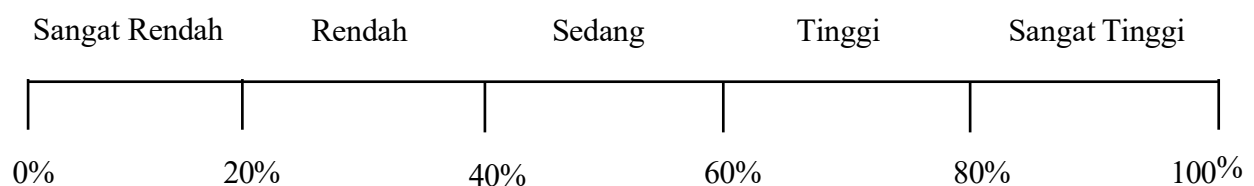
- a. Kegiatan yang menjadi prioritas desa untuk dibiayai dan diimplementasikan secara mandiri oleh desa/masyarakat (swadaya).
- b. Pelaksanaan program unggulan desa yang pendanaannya ditopang oleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai representasi dana transfer dari APBD Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber pendapatan desa sah lainnya guna mencapai target pembangunan tertentu
- c. Permasalahan krusial desa yang diusulkan melalui forum Musrenbang kecamatan untuk mendapatkan persetujuan sebagai program prioritas daerah, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun APBD Provinsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Riset kualitatif bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan secara mendalam peristiwa, fenomena, dan kondisi social yang dikaji. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berdasarkan kondisi lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada bulan januari hingga maret 2025. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Batang merupakan salah satu desa yang aktif melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dalam proses pembangunan desa.

Informasi penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informasi dianggap mengetahui dan memahami proses pembangunan desa. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat serta masyarakat umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : observasi yang dilakukan untuk mengamati secara langsung proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada informan penelitian guna memperoleh informasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya, selanjutnya dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi terkait pembangunan desa seperti data Musrenbang, RPJMDes, dan dokumentasi kegiatan pembangunan, terakhir kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat menggunakan skala likert.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi persepsi dan derajat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Batang. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah menggunakan instrumen Skala Likert dengan prosedur implementasi sebagai berikut:



Penentuan klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala

interval sebagai berikut: skor 81–100% diklasifikasikan sebagai sangat tinggi; 61–80% diklasifikasikan tinggi; 41–60% diklasifikasikan sedang; 21–40% diklasifikasikan rendah; dan 0–20% diklasifikasikan sangat rendah (Purnomo et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Batang Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

Desa Batang memiliki total penduduk 2.407 jiwa, sesuai data kependudukan desa. Secara umum, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, terutama dalam forum Musrenbang Desa, berada pada klasifikasi sedang. Distribusi data partisipasi tersebut dipaparkan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Ikut Rapat Musrenbang Desa

	Rapat Musrenbang Desa Batang		Total	Persentase (%)
2023	Hadir	38	80	47%
	Tidak Hadir	42		
2024	Hadir	49	85	58%
	Tidak Hadir	36		
2025	Hadir	40	78	51%
	Tidak Hadir	38		

Sumber : Data Primer 2025

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa tren partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di Desa Batang menunjukkan fluktuasi yang positif dibandingkan dengan tahun 2023. Capaian partisipasi mencapai titik kulminasi pada tahun 2024, disusul oleh penurunan marginal pada tahun 2025, namun tingkat keterlibatan tersebut tetap menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan data dasar pada tahun 2023.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil wawancara responden oleh Bapak R yang mengatakan bahwa:

”Tingkat partisipasi dalam menghadiri rapat musrenbang di Desa Batang cukup banyak yang hadir. Saya sendiri bisa hadir pada rapat musrenbang melalui undangan secara langsung, tapi saya juga terkadang tidak dapat hadir karna pekerjaan saya sebagai pedagang di pasar, jadi selama musyawarah saya juga relative menyampaikan usulan saya yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam menyusun program-programnya....”

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak HS yang mengatakan bahwa:

”saya pribadi terkadang bisa ikut rapat musrenbang, terkadang juga tidak dapat ikut rapat musrenbang. Karena saya seorang petani yang diutus sebagai perwakilan tokoh masyarakat dalam rapat musrenbang, oleh karena itu saya biasa tidak dapat hadir karna kesibukan sebagai petani.”

Kesimpulan dari hasil wawancara, yang didukung oleh data partisipasi sedang pada tabel sebelumnya, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa berada dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh kesibukan sebagian besar warga Desa Batang dengan pekerjaan masing-masing (seperti pedagang dan petani), yang mengakibatkan keterbatasan waktu untuk menghadiri rapat desa secara rutin.

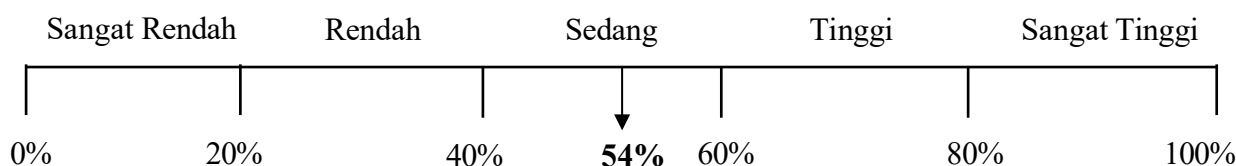
Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai hasil analisis, Tabel 3 berikut menyajikan skor gabungan untuk variabel Perencanaan Pembangunan Desa.

Tabel 3. Skor Gabungan Partisipasi Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Batang

Klasifikasi	Interval	Frekuensi
Sangat Tinggi (ST)	$81 < skor \leq 100$	6
Tinggi (T)	$61 < skor \leq 80$	24
Sedang (S)	$41 < skor \leq 60$	-
Rendah (R)	$21 < skor \leq 40$	-
Sangat Rendah (SR)	≤ 20	-
Presentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor interval		$= \frac{327}{610} \times 100 = 54 \%$

Sumber : Data primer 2025

Berdasarkan Tabel 3, total skor gabungan analisis partisipasi perencanaan di Desa Batang adalah 327. Nilai ini berasal dari skor total 30 responden dan diklasifikasikan berada dalam rentang skor 610 - 800 yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berada di klasifikasi "sedang". Untuk mengukur presentase skor gabungan ini, skor total yang diperoleh dibagi dengan skor interval maksimum dan dikalikan 100, menghasilkan nilai 54%. Hasil analisis dapat diperjelas dengan gambar 1 skala skor gabungan relatif Bidang Perencanaan Pembangunan Desa sebagai berikut:



Gambar 1. Skala Skor Gabungan Relatif Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

Mengacu pada skala likert yang ditampilkan, tingkat partisipasi masyarakat Desa Batang dalam aspek perencanaan pembangunan desa diklasifikasikan sebagai klasifikasi "sedang" karena skor gabungannya sebesar 54% berada dalam rentang klasifikasi tersebut.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dengan total penduduk 2.407 jiwa, seharusnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat berjalan optimal. Data mengenai pelaksanaan pembangunan Desa Batang dapat dianalisis lebih lanjut melalui tabel 4, yang merinci seberapa jauh masyarakat mengetahui program pembangunan yang sedang atau sudah direalisasikan di desa.

Tabel 4. Seberapa Besar Masyarakat Mengetahui Program Pembangunan Desa yang Sedang atau Sudah Dilaksanakan

Tingkat Partisipasi	Responden	Persentase
Sangat Tinggi	6	20
Tinggi	8	27
Sedang	12	40

Tingkat Partisipasi	Responden	Persentase
Rendah	3	10
Sangat Rendah	1	3
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer 2025

Tabel 4 merinci tingkat pengetahuan masyarakat Desa Batang terhadap program pembangunan yang sedang/sudah dilakukan. Tingkat pengetahuan didominasi oleh klasifikasi 'sedang', yaitu 12 responden (40%). Responden yang menyatakan pengetahuan 'tinggi' berjumlah 8 orang (27%), 'sangat tinggi' 6 orang (20%), 'rendah' 3 orang (10%), dan 'sangat rendah' 1 orang (3%). Data ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program 60 pembangunan desa termasuk klasifikasi "sedang". Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak K yang menyatakan:

"iya, saya tau sedikit tentang program pembangunan desa ini, seperti tahun lalu tentang program pembangunan jalan tani. Itu saja yang saya tau, selebihnya saya tidak tau."

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak MH, yang menyatakan bahwa:

"Jujur saya kurang tau semua program pembangunan yang sedang dilakukan sekarang, kalau yang sudah saya tau. Tahun lalu sama tahun 2023 itu sudah dua dusun yang dilaksanakan program jalan tani dan itu sangat bermanfaat untuk kami para petani, jalan tani itu mempermudah kami juga dalam masa panen."

Kesimpulan dari wawancara menunjukkan bahwa tidak semua program Pembangunan yang sedang berlangsung diketahui oleh Masyarakat. Namun, program yang sudah selesai dilaksanakan seperti Pembangunan jalan usaha tani di dua dusun selama dua tahun terakhir diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh warga desa.

Guna memperjelas hasil terhadap temuan penelitian, Tabel 5 berikut menyajikan agregat skor pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Tabel 5. Skor Gabungan Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Batang

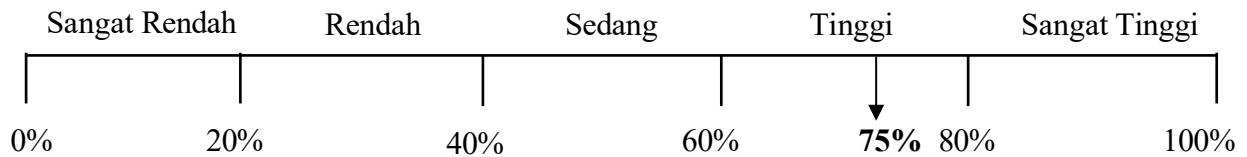
Klasifikasi	Interval	Frekuensi
Sangat Tinggi (ST)	$81 < skor \leq 100$	9
Tinggi (T)	$61 < skor \leq 80$	21
Sedang (S)	$41 < skor \leq 60$	-
Rendah (R)	$21 < skor \leq 40$	-
Sangat Rendah (SR)	≤ 20	-
Presentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor interval	$= \frac{458}{610} \times 100 = 75\%$	

Sumber : Data Primer 2025

Hasil analisis (tabel 5) menunjukkan bahwa skor gabungan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Batang, mencapai 458. Mengingat nilai ini berada dalam interval klasifikasi tinggi (610–800), maka disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang ini tergolong tinggi. Perhitungan persentase skor gabungan (skor gabungan dibagi interval tinggi dikali 100) menghasilkan 75%. Detail analisis skor gabungan relatif Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa disajikan pada gambar 2

Visualisasi hasil analisis mengenai skala skor gabungan relatif pada Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa disajikan secara lebih mendetail pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Skala Skor Gabungan Relatif Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Batang, berada pada klasifikasi tinggi, sebagaimana diinterpretasikan dari skor rata-rata Skala Likert.

Bidang Evaluasi/Monitoring (Pengawasan Proses Pembangunan)

Monitoring dan evaluasi memainkan peran krusial dalam menjamin keberlanjutan pembangunan desa. Aktivitas ini menciptakan simbiosis di mana masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja birokrasi, sedangkan pemerintah desa mampu memetakan progres program guna memastikan keselarasan dengan kebutuhan riil masyarakat. Representasi data mengenai partisipasi masyarakat dalam memonitor aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan dipaparkan pada tabel 6:

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Ikut Memonitoring Kesesuaian Perencanaan/Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tingkat Partisipasi	Responden	Persentase
Sangat Tinggi	6	20
Tinggi	21	70
Sedang	3	10
Rendah	-	-
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer 2025

Data yang disajikan pada tabel 6 mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam memonitoring/mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berada dalam klasifikasi tinggi. Distribusi jawaban responden meliputi 20% (6 responden) yang menyatakan sangat tinggi, 37% (11 responden) menyatakan tinggi, 33% (10 responden) menyatakan sedang, dan 10% (3 responden) menyatakan rendah.

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara secara langsung dengan Ibu SA yang mengatakan bahwa:

“iya, saya ikut ngawasi. Soalnya saya juga mau tahu pembangunan di desa ini sudah sesuai dengan pelaksananya atau tidak. Seperti program pengadaan bibit sayuran tahun 2023, saya datang langsung ke kantor desa untuk mengecek apakah program ini menguntungkan untuk seluruh masyarakat atau tidak.”

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak N, yang mengatakan bahwa:

“iya, terkadang saya ikut lihat-lihat juga, karena pembangunan di desa ini kan untuk

kepentingan kita semua. Jadi kalau saya ada waktu luang, saya turun langsung untuk liat.”

Hasil dari wawancara menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi Masyarakat tergolong tinggi, mengingat adanya keterlibatan berkelanjutan warga dalam memonitoring dan mengawasi implementasi program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa (dalam kapasitasnya sebagai penyedia sarana pelayanan). Program pembangunan des aini berpotensi signifikan dalam mendorong kemajuan desa.

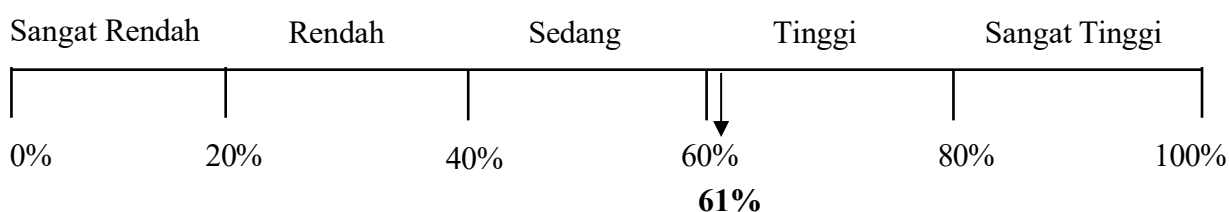
Guna memperjelas temuan analisis, tabel 7 berikut menyajikan skor gabungan Bidang Evaluasi/Monitoring Pembangunan Desa di Desa Batang.

Tabel 7. Skor Gabungan Dalam Bidang Evaluasi/Monitoring Pembangunan Desa di Desa Batang

Klasifikasi	Interval	Frekuensi
Sangat Tinggi (ST)	$81 < skor \leq 100$	2
Tinggi (T)	$61 < skor \leq 80$	28
Sedang (S)	$41 < skor \leq 60$	-
Rendah (R)	$21 < skor \leq 40$	-
Sangat Rendah (SR)	≤ 20	-
Presentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor interval		$= \frac{372}{610} \times 100 = 61\%$

Sumber : Data Primer 2025

Hasil analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang evaluasi atau monitoring pembangunan desa di Desa Batang menghasilkan skor gabungan sebesar 372. Mengacu pada kriteria interval 610–800, capaian ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan persentase sebesar 60,9%. Distribusi data tersebut secara lebih komprehensif dipaparkan dalam Gambar 3 yang merepresentasikan skala skor gabungan relatif untuk bidang terkait:



Gambar 3 . Skala Skor Gabungan Relatif Bidang Evaluasi/Monitoring Pembangunan Desa

Hasil pengukuran dengan Skala Likert mengonfirmasi bahwa partisipasi publik dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan di Desa Batang, berada pada klasifikasi tinggi.

Bidang Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa

Dalam rangka optimalisasi sarana prasarana dan peningkatan pelayanan publik di Desa Batang, berbagai infrastruktur telah direalisasikan pada tahun 2023, termasuk pembangunan talud, sumur bor, bak air, jalan tani, pengadaan lampu jalan, dan bibit sayuran. Pembangunan pelayanan umum oleh pemerintah desa ini sangat vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menunjukkan peran serta aktif dalam membantu proses pembangunan yang dilakukan secara swakelola dengan keterlibatan warga desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8 hasil

pembangunan yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat desa dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Pembangunan yang Dirasakan oleh Semua Lapisan Masyarakat Desa

Tingkat Partisipasi	Responden	Persentase
Sangat Tinggi	6	20
Tinggi	18	60
Sedang	6	20
Rendah	-	-
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer 2025

Pada tabel 8, dapat dilihat bahwa jawaban responden terkait hasil pembangunan yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat desa, yang menyatakan sangat tinggi sebanyak 6 responden dengan presentase 20%, yang mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap hasil pembangunan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat desa berada dalam klasifikasi tinggi. Distribusi jawaban responden menunjukkan 20% (6 responden) pada klasifikasi sangat tinggi, 60% (18 responden) pada klasifikasi tinggi, dan 20% (6 responden) pada klasifikasi sedang.

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara secara langsung dengan Ibu NR yang mengatakan bahwa:

“masyarakat di Desa Batang ini sudah merasakan hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya, seperti jalan tani, sumur bor, untuk ibu-ibu juga sudah dapat bantuan bibit sayuran. Kalau tahun ini belum, karena rapat musrenbang belum diadakan lagi.”

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh ibu J, yang mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya, sebagian besar masyarakat sudah merasakan hasil pembangunan di desa, seperti pengadaan bibit jagung sama bibit kacang, posyandunya juga yang sekarang sudah aktif tiap bulan.”

Dari hasil wawancara dan presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Batang pada umumnya telah merasakan manfaat dari hasil pembangunan desa pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hasil pembangunan yang dirasakan antara lain pembangunan jalan tani, penyediaan sumur bor, bantuan bibit sayuran, serta pengadaan bibit jagung dan kacang. Selain itu, kegiatan pelayanan masyarakat seperti posyandu juga telah berjalan secara aktif setiap bulan. Namun, untuk tahun berjalan, pembangunan belum dirasakan karena musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) belum dilaksanakan kembali.

Guna memperjelas terkait hasil analisis, Tabel 9 berikut menyajikan data mengenai skor gabungan pada Bidang Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa di Desa Batang.

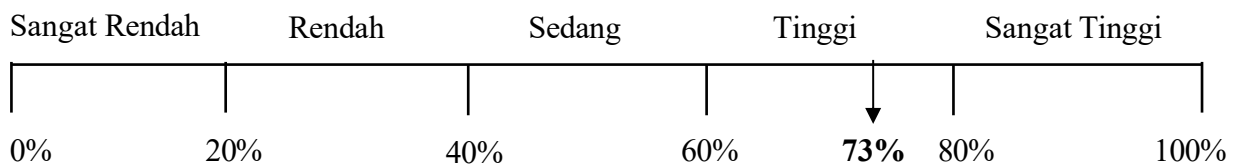
Tabel 9. Skor Gabungan Dalam Bidang Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa di Desa Batang

Klasifikasi	Interval	Frekuensi
Sangat Tinggi (ST)	$81 < skor \leq 100$	3
Tinggi (T)	$61 < skor \leq 80$	27
Sedang (S)	$41 < skor \leq 60$	-
Rendah (R)	$21 < skor \leq 40$	-
Sangat Rendah (SR)	≤ 20	-

$$\text{Presentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor interval} = \frac{443}{610} \times 100 = 73\%$$

Sumber : Data Primer 2025

Tabel 9 mengungkapkan bahwa skor gabungan hasil analisis partisipasi masyarakat dalam bidang pemanfaatan hasil pembangunan desa di Desa Batang, mencapai 443. Mengingat nilai ini masuk dalam interval klasifikasi tinggi (610–800), maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut diklasifikasikan tinggi. Persentase skor gabungan yang diperoleh adalah 73%, didapatkan dari pembagian skor gabungan dengan interval tinggi, lalu dikalikan 100. Hasil analisis dapat diperjelas dengan gambar 4 skala skor gabungan relatif Bidang Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa sebagai berikut:



Gambar 4. Skala Skor Gabungan Relatif Bidang Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa

Berdasarkan interpretasi Skala Likert, penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik dalam pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Batang, berada pada klasifikasi tinggi.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Guna memberikan gambaran yang komprehensif atas hasil analisis setiap indikator, Tabel 10 berikut menyajikan rekapitulasi data penelitian sebagai berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Batang

Tahapan Partisipasi	Persentase	Klasifikasi
Perencanaan	54%	Sedang
Pelaksanaan	75%	Tinggi
Evaluasi/Monitoring	61%	Tinggi
Pemanfaatan Hasil	73%	Tinggi
Jumlah	263	
Rata-rata	66%	Tinggi

Sumber : Data Primer 2025

Analisis data dalam Tabel 10 merefleksikan heterogenitas tingkat partisipasi masyarakat Desa Batang di berbagai bidang pembangunan. Meskipun partisipasi dalam tahap perencanaan cenderung moderat (sedang), keterlibatan warga pada tahap pelaksanaan, monitoring, dan pemanfaatan hasil pembangunan justru menunjukkan intensitas yang kuat (tinggi). Dengan capaian rata-rata sebesar 66%, secara umum derajat partisipasi masyarakat di wilayah penelitian ini tergolong dalam klasifikasi tinggi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Batang

Partisipasi aktif masyarakat pedesaan merupakan elemen penting (kunci) dalam menjamin keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Walaupun demikian, keberhasilan suatu pembangunan juga perlu ditinjau dari faktor-faktor pendorong dan penghambatnya di desa. Tiga faktor utama pendorong pembangunan desa adalah kesempatan, kemauan, dan kemampuan.

A. Faktor Pendorong

a. Kesempatan

Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam menyediakan kesempatan untuk Masyarakat dalam berpartisipasi. Wujud dari kesempatan tersebut yaitu berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring) proses, dan pemanfaatan hasil dari Pembangunan.

b. Kemauan

Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa secara fundamental didorong oleh proyeksi manfaat yang akan mereka terima. Hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung menjadi faktor determinan yang menumbuhkan motivasi warga. Merujuk pada Tabel 9, tingkat pemanfaatan hasil pembangunan yang berada pada klasifikasi tinggi di Desa Batang membuktikan bahwa dampak positif pembangunan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan partisipasi publik pada tahapan-tahapan selanjutnya.

c. Kemampuan

Tabel 11. Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	TK	62
2.	SD	829
3.	SMP	316
4.	SMA/SMK	898
5.	D1, D2, D3	24
6.	Sarjana	203

Sumber : Kantor Desa Batang 2025

Tabel 11 menunjukkan dominasi penduduk dengan latar belakang pendidikan setara SMA/SMK di Desa Batang, yang mencapai 898 jiwa. Tingginya angka partisipasi sekolah ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang progresif terhadap pentingnya pendidikan. Dalam konteks pembangunan desa, tingkat pendidikan yang memadai tersebut menjadi modal sosial yang esensial dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih kritis dan substantif.

B. Faktor Penghambat

a. Sifat Individu

Temuan penelitian di Desa Batang, menunjukkan bahwa kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor internal berupa sifat atau kecenderungan individu dari sebagian anggota masyarakat itu sendiri. Sifat individu ini, seperti rasa malas, sikap apatis, masa bodoh, serta ketidakmauan untuk melakukan perubahan demi kemajuan desa, menjadi penghambat keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah maupun pelaksanaan program pembangunan.

b. Demografis Sosial

Hasil penelitian di Desa Batang, menunjukkan bahwa faktor demografis sosial seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan berperan penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan desa. Ketiga aspek ini memengaruhi cara pandang, kesadaran, serta kemampuan individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan.

a). Usia

Karakteristik informan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12. Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

No.	Umur	Informan	Persentase
1.	18 – 25	5	17%
2.	26 – 35	7	23%
3.	36 – 45	12	40%
4.	46 – 55	4	13%
5.	56 – 65	2	7%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Primer 2025

Dapat dilihat pada umur 18 – 25 tahun berjumlah 5 informan dengan persentase 17%, umur 26 – 35 tahun berjumlah 7 informan dengan persentase 23%, umur 36 – 45 tahun berjumlah 12 informan dengan persentase 40%, umur 46 – 55 tahun berjumlah 4 informan dengan persentase 13%, dan umur 56 – 65 tahun berjumlah 2 informan dengan persentase 7%, dari total 30 informan dengan persentase 100%.

b). Jenis Kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Informan	Persentase
1.	Laki-laki	18	60%
2.	Perempuan	12	40%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Primer 2025

dari jumlah informan yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 informan dengan persentase 100%, yang terdiri dari 18 informan laki-laki dengan persentase 60% dan 12 informan perempuan dengan persentase 40%. Dari hasil informan berdasarkan jenis kelamin, partisipasi laki-laki lebih dominan dalam forum perencanaan karena dianggap memiliki peran utama dalam urusan publik desa. Namun demikian, partisipasi perempuan mulai terlihat terutama dalam menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan anak, kesehatan, dan kegiatan ekonomi rumah tangga. Meskipun jumlahnya masih terbatas, kehadiran perempuan dalam perencanaan pembangunan desa menjadi bukti adanya kesadaran bahwa pembangunan desa harus mencakup kepentingan seluruh kelompok masyarakat.

c). Pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada table 14 sebagai berikut:

Tabel 14. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Informan	Persentase
1.	SD	6	20%
2.	SMP	4	13%
3.	SMA	11	37%
4.	Sarjana	9	30%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Primer 2025

Tingkat pendidikan informan berdasarkan tabel 4.16 sangat bervariasi di mulai dengan tingkat SD sampai dengan tingkatan sarjana. Tingkat pendidikan informan menunjukkan tingkat SD sebanyak 6 informan dengan persentase 20%, tingkat SMP sebanyak 4 informan dengan persentase 13%, tingkat pendidikan SMA sebanyak 11 dengan persentase 37%, dan tingkat sarjana sebanyak 9 informan dengan persentase 30%.

Tingkat pendidikan terbukti berpengaruh besar terhadap kualitas partisipasi masyarakat. Warga dengan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi lebih berani menyampaikan pendapat, mampu mengkritisi rencana pembangunan, serta memberikan usulan yang lebih rasional sesuai kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula kapasitasnya untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa secara aktif dan kritis.

c. Ekonomi

Hasil penelitian bahwa faktor ekonomi, pekerjaan, dan penghasilan merupakan pendorong penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Batang pada perencanaan pembangunan. Semakin baik kondisi ekonomi masyarakat, semakin besar pula peluang mereka untuk berkontribusi secara aktif. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperhatikan kondisi sosioekonomi warga dengan cara mengatur jadwal musyawarah yang fleksibel serta memberikan dorongan agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap merasa penting dan dibutuhkan dalam proses pembangunan desa. Dapat dilihat pada tabel 15 pada karakteristik informan berdasarkan pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 15. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Informan	Persentase
1.	Petani	9	30%
2.	Pedagang	6	20%
3.	IRT	5	17%
4.	Karyawan Swasta	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Primer 2025

Fenomena ini dapat dilihat pada tabel 4.17 yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, cenderung memiliki waktu dan kesempatan lebih besar untuk terlibat aktif dalam kegiatan musyawarah

maupun program pembangunan. Kondisi ekonomi yang stabil membuat mereka tidak terbebani oleh kebutuhan dasar yang mendesak, sehingga dapat lebih fokus memberikan perhatian pada kepentingan kolektif desa.

Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah dan penghasilan yang tidak menentu lebih sering mengutamakan pekerjaan sehari-hari dibandingkan menghadiri musyawarah pembangunan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi membuat mereka harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan keluarga. Beberapa warga yang bekerja sebagai buruh harian atau petani, menyatakan bahwa sulit meninggalkan pekerjaan karena penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan harian. Akibatnya, partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan menjadi rendah.

Pembahasan

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Batang

Tabel 16. Pemahasan Tingkat Partisipasi Masyarakat

No	Tahapan Partisipasi	Persentase	Kategori
1	Perencanaan	54%	Sedang
2	Pelaksanaan	75%	Tinggi
3	Evaluasi/Monitoring	61%	Tinggi
4	Pemanfaatan Hasil	73%	Tinggi
	Rata-rata	66%	Tinggi

Dapat dilihat pada tabel 16, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Batang dalam pembangunan desa menunjukkan variasi pada setiap tahapannya. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat berada pada klasifikasi sedang dengan persentase sebesar 54%. Hal ini dipengaruhi oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja sehingga tidak seluruhnya dapat hadir dalam rapat musrenbang desa, meskipun sebagian masyarakat tetap menyampaikan usulan atau masukan. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat tergolong tinggi dengan persentase 75%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian dan keterlibatan aktif dalam mendukung program pembangunan desa yang sedang atau telah dilaksanakan, meskipun informasi tentang program pembangunan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, pada tahap evaluasi/monitoring, partisipasi masyarakat juga tergolong tinggi dengan persentase 61%. Hal ini memperlihatkan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan desa untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya. Selain itu, pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan, partisipasi masyarakat kembali berada pada klasifikasi tinggi dengan persentase 73%. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat sudah merasakan manfaat nyata dari pembangunan desa, seperti infrastruktur jalan tani, sumur bor, bibit pertanian, dan pelayanan posyandu. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat Desa Batang dalam pembangunan desa berada pada klasifikasi tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 66%.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat apabila masyarakat memiliki kesempatan dan kekuatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Tingkat partisipasi

masyarakat Desa Batang yang berada pada kategori partnership menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadawiyah et.al (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh keterbukaan pemerintah desa dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa di Desa Batang menunjukkan hasil yang baik berkat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, meskipun ditemukan bahwa partisipasi pada tahap perencanaan masih perlu dioptimalkan. Secara spesifik, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Batang, Bontotiro, Bulukumba, diklasifikasikan pada Derajat Kekuasaan Warga Negara (Degree of Citizen Power), tangga keenam, yaitu Kemitraan (Partnership).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Batang

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Batang dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meliputi kesempatan yang diberikan pemerintah desa, kemauan masyarakat yang tumbuh karena adanya manfaat dari pembangunan, serta kemampuan yang didukung oleh tingkat pendidikan yang relatif baik. Sementara itu, faktor penghambat meliputi sifat individu yang cenderung pasif atau apatis, kondisi demografis sosial seperti perbedaan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, serta faktor ekonomi yang membatasi waktu dan peluang sebagian masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana faktor pendorong dapat dimaksimalkan dan faktor penghambat dapat diminimalisir sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata pada setiap tahapan pembangunan. Mengacu pada riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sry Yunita (2023), disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal dan eksternal.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa faktor pendorong berupa kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan, sementara faktor penghambat seperti rendahnya motivasi individu, keterbatasan ekonomi, serta perbedaan kondisi sosial demografis dapat menurunkan tingkat partisipasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di Desa Batang, dimana faktor pendorong dan penghambat memiliki peranan yang signifikan terhadap tinggi rendahnya partisipasi Masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait tingkat partisipasi publik dalam agenda pembangunan Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, penelitian ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan utama sebagai berikut:"

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Batang dalam agenda pembangunan desa di klasifikasikan dalam predikat tinggi, dengan perolehan skor gabungan rata-rata sebesar 66%. Tingkat partisipasi tertinggi terdapat pada tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan, sedangkan partisipasi pada tahap perencanaan masih pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih aktif terlibat pada tahap pelaksanaan dibandingkan pada proses pengambilan keputusan pembangunan,

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meliputi kesempatan yang diberikan pemerintah desa, kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, serta kemampuan masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi sifat individu yang pasif, kondisi sosial demografis, serta keterbatasan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori partisipasi Arnstein bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan meningkat apabila masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Batang yang berada pada tingkat partnership menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang turut berkontribusi dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Secara itu, pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang aktif berpartisipasi, seperti masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah, perempuan, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat secara merata pada setiap tahapan pembangunan sehingga tujuan pembangunan desa yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih optimal.

REFERENSI

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Arnstein, S. R. (1969). La Escalera de la Participacion. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya Fikri Azhar. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 63–70.
- Bramantyo, Y. R., Windradi, S., & Mahuri. (2022). Peran kepala desa, perangkat desa dan lembaga musyawarah masyarakat desa dalam kedudukannya sebagai pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 152–167.
- Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musreimbang) Desa. *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*.
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Community Participation in Village Development Planning Deliberation. *Jurnal Ilmiah Adminstrasi Publik*, 3(September), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Ismail, M. R., Rachman, E., & Thalib, T. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubalakabupaten Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4 SE-Articles), 9791–9798.
- Latif, A., & Mustamin, A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 144–164.
- Naisoko, F., & Bait, P. M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 166–

175. <https://doi.org/https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>
- Poespito Hadi, W., & Fe, T. E. F. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA. *Open Jurnal Systems*, 18(1978), 43–50.
- Pono, H., Lengkong, F. D. J., & Palar, N. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Apulea Kecamatan Loloda Uarakabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik JAP*, VIII(116), 37–44.
- Purnomo, M., Rahmaini, P., & Sari, T. M. (2024). *Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023)*. 4, 13752–13763.
- Rahayuningsih, P., & Arbayah, S. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA KAMBITIN RAYA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Admistrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4, 1114–1129. <https://doi.org/Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/>
- Rufita, D., Setiawati, B., & Suparti, H. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Lihat Dari Partisipasi Buah Pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Japb*, 2(2), 522–537.
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 48–58. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>
- Tambaip, B., Moento, A. M., & Tjilen, P. A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Admistrasi Dan Sosial*, 12(1), 121–129.
- Wahyudin. (2018). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa tanah karaeng kecamatan manuju kabupaten gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Yuda, A. A., Mapperenta, Awaluddin, & Mallongi, S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba). *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 98–107.